



REKRUTMEN DAN KADERISASI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM 2019 OLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Melna Andani¹⁾, Ridhah Taqwa²⁾, Zulfikri Suleman³⁾

Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sriwijaya^{1,2,3)}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kaderisasi calon legislatif perempuan dalam pemilihan umum 2019 Oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Wawancara dilakukan pada informan yang merupakan calon legislatif perempuan dan struktur pengurus di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil penelitian adalah Partai Keadilan Sejahtera melakukan proses rekrutmen anggota menggunakan mekanisme seligmen yaitu (1) Melakukan penjangkaran kader pemula melalui beberapa sarana seperti Rohis, Ikatan Remaja Masjid, Lembaga Dakwah Kampus, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat. (2) Melakukan penyaringan setiap kader pemula diseleksi sesuai dengan syarat yang ditentukan. (3) Penetapan sebagai kader. PKS juga melakukan rekrutmen calon legislatif perempuan dengan beberapa jalur yaitu (1) Berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki kader internal maupun eksternal seperti modal sosial, politik dan Ekonomi. (2) Berdasarkan kaderisasi, kader yang berada pada jenjang kader muda yang dapat menjadi caleg. Kaderisasi dilakukan PKS berkaitan dengan (1). Penyiapan kapasitas dan kemampuan seperti halaqoh, penugasan, *jalasah ruhiyah*, *dauorah rihlah* dan mabit. (2) Jenjang kaderisasi dan keahlian kader; (3) Pendidikan politik calon legislatif perempuan.

Kata Kunci : Calon Legislatif Perempuan, Kaderisasi, Partai Keadilan Sejahtera.

*Correspondence Address : melna0404@gmail.com¹⁾, ridhotaqwa@fisip.unsri.ac.id^{2,3)}

DOI : 10.31604/jips.v6i3.2019.427-444

©2019 Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan UM-Tapanuli Selatan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berpolitik, baik laki-laki maupun perempuan. Pada kenyataannya pada sistem politik yang ada di Indonesia lebih didominasi oleh kaum laki-laki dari pada perempuan. Oleh karena itu pemerintah memberikan kuota 30 persen kepada kaum perempuan untuk menjabat menjadi anggota dewan di parlemen. Sehingga aspirasi perempuan dapat tersampaikan. Peraturan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pada pasal 245 yang menyatakan bahwa syarat untuk mengikuti pemilihan umum setiap partai harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen didalam bakal calon anggota dewan yang didaftarkan ke KPU.

Peraturan perundang-undangan yang memberikan kuota perempuan di parlemen sebesar 30 persen agar dapat mengikuti pemilihan umum, tidak menjamin kesetaraan dan kesamaan hak dalam berpolitik antara perempuan dan laki-laki. Pada kenyataannya calon anggota dewan yang berhasil lolos ke parlemen jauh di bawah 30 persen. Hal ini terjadi di anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dari periode 2009 hingga 2019 kuota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tidak mencapai 30 persen.

Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada pemilihan umum tahun 2009 hanya 6,66 persen saja. Pada tahun 2014 keterwakilan perempuan meningkat menjadi 11,11 persen sedangkan pada tahun 2019 persentase perempuan tetap pada angka 11,11 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan yang lolos anggota DPRD masih sangat rendah dari kuota 30 persen yang ditetapkan pemerintah.

Budaya patriarki yang ada di masyarakat menempatkan perempuan berada diposisi kedua setelah laki-laki. Perempuan diposisikan pada peran domestik dan reproduksi saja, sehingga menghambat kemajuan perempuan di dunia publik dan produksi. Pandangan bahwa perempuan itu irasional, dianggap tidak tepat untuk jadi pemimpin. *Streotype* pada perempuan ini sudah mengakar kuat di masyarakat sehingga perempuan tersubordinasi dari dunia politik.

Pengkaderan perempuan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas perempuan di anggota legislatif. Pengkaderan perempuan merupakan tugas dari partai politik. Salah satu bentuk pengkaderan adalah pendidikan politik yang merupakan fungsi dan tugas dari partai politik. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Pada Pasal 34 (3b) yang menyatakan bahwa partai politik harus menjalankan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Undang-undang yang mengatur kuota perempuan 30 persen di dalam anggota dewan belum teraktualisasi dengan peningkatan kualitas perempuan dalam pengkaderan. Maka untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan diparlemen tentunya setiap partai politik harus memiliki kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas. Salah satu partai politik yang sangat aktif dalam pengkaderan terutama perempuan adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki sistem kaderisasi paripurna yang tidak dimiliki oleh partai lain yaitu salah satunya

untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan kader yaitu Haloqoh yang dilakukan setiap minggu secara terus menerus.

PKS memiliki jenjang dalam pengkaderan yaitu anggota pemula, anggota muda, anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli dan anggota purna. Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana rekrutmen pada jenjang anggota pemula dan anggota muda yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang di keluarkan oleh Dewan Pengurus Daerah sehingga dapat diajukan sebagai anggota legislatif.

Berdasarkan observasi peneliti sekarang ini calon legislatif perempuan hanya sebatas memenuhi kuota 30 persen saja sebagai syarat untuk mengikuti pemilu 2019. Meskipun kuota untuk kaum perempuan diparlemen telah ditetapkan, hal ini tidak dibarengi dengan pendidikan politik yang harus didapatkan oleh calon legislatif perempuan. Oleh karena itu pada kenyataannya saat pemilihan umum, yang terpilih sebagai anggota dewan perempuan masih rendah jauh dari kuota 30 persen yang telah ditetapkan pemerintah. Seharusnya calon legislatif perempuan dibekali keahlian maupun kemampuan untuk menjadi anggota dewan agar dapat mampu bersaing

dengan calon legislatif laki-laki di dunia politik. Maka, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana proses pengkaderan calon legislatif perempuan dari partai PKS pemilu 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian fenomenologi. Teknik pemilihan informan menggunakan metode *purposive*. dengan unit analisis adalah individu calon legislatif perempuan partai PKS Kabupaten Ogan Komering Ilir. Teknik analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: Mengorganisasikan semua, Membaca data secara keseluruhan, Menemukan dan mengelompokkan makna, Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif dan Membuat laporan pengalaman setiap partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini pada bagian pertama membahas tentang proses rekrutmen anggota partai keadilan sejahtera dan rekrutmen pejabat publik yaitu calon anggota legislatif perempuan

di DPRD. Bagian kedua membahas tentang proses kaderisasi perempuan yang dilakukan PKS dan juga kaderisasi calon legislatif perempuan..

A. Rekrutmen Kader PKS

Partai politik harus memiliki regenerasi, tentunya dengan melakukan rekrutmen untuk menjadi kader dari partai politik, dan setiap partai politik memiliki pola yang berbeda-beda dalam melakukan proses rekrutmen, begitupun dengan partai keadilan sejahtera untuk kepentingan regenerasi dan juga memenuhi salah satu tugas dan fungsi dari partai politik yaitu melakukan rekrutmen. Dari rekrutmen inilah yang nantinya akan menentukan kualitas kader yang akan menjadi pejabat publik. Setiap partai politik memiliki cara masing-masing untuk melakukan rekrutmen kader seperti Partai Keadilan Sejahtera. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota partai politik manapun. Dalam model sligmen proses rekrutmen terdiri dari penjarangan, penyaringan dan penetapan. Keanggotaan partai PKS sendiri memiliki jenjang yang dibagi menjadi. (1) Anggota pendukung yaitu pemula dan anggota muda. (2). Anggota inti terdiri dari madya, dewasa, ahli, purnah dan anggota kehormatan. Pada

proses rekrutmen ini akan melihat bagaimana partai melakukan penjangkaran untuk mendapatkan anggota pemula dan melihat proses penyaringan apa saja kriteria yang harus dimiliki anggota pemula sehingga dapat menjadi anggota muda dan bagaimana penetapannya.

Setiap partai tentu memiliki berbagai cara agar dapat merekrut sebanyak-banyaknya kader agar adanya regenerasi untuk melanjutkan perjuangan politik. Seperti halnya Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki tujuan dakwah dalam setiap perjuangan politiknya. Misi utama dakwahnya adalah melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah mengubah kehidupan umat manusia sehingga sejalan dengan tuntunan islam, baik tingkat individu maupun tingkat kolektif. Sehingga terwujudlah sebuah tatanan kehidupan yang baik menurut syariat islam.

Oleh karena itu partai PKS memiliki berbagai media untuk proses penjangkaran. Proses penjangkaran yaitu memperkenalkan partai politik kepada individu atau suatu kelompok. Sasarannya bisa pemilih ideologis, pemilih yang setia yang belum menjadi anggota, atau jalur kerabat politisi partai, dan organisasi-organisasi

kepemudaan. lebih khususnya penjangkaran yang dilakukan PKS yaitu melalui beberapa media seperti Sekolah Ialam Terpadu, Rohis SMP dan SMA , Lembaga Dakwah Kampus, Ikatan Remaja Masjid, Organisasi Pemuda, dan organisasi masyarakat di dewan pengurus cabang. Sasaran dalam proses penjangkaran ini adalah masyarakat umum yang mau tergabung dalam beberapa media rekrutmen Dari partai PKS OKI. Yang berperan dalam proses Penjangkaran ini adalah seluruh kader PKS karena memang yang bertugas untuk mencari anggota adalah kewajiban semua kader PKS.

Kader PKS yang dikaryakan sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki masing-masing kader setiap kader tersebar diberbagai institusi untuk mewarnai setiap lembaga dengan karakter islam. Kader PKS mengemban tugas dakwah pada dirinya dengan melakukan kebaikan dan juga mengajak setiap orang kejalan kebaikan. Kader PKS yang tersebar diseluruh lembaga dan instansi merupakan media untuk merekrut kader pemula oleh karena itu mereka juga harus mempunyai binaan.

Setiap anggota bertanggung jawab untuk merekrut anggota partai adalah tanggung jawab semua anggota

yang telah tergabung dalam partai PKS melalui media apa saja dimana anggota tersebut berkarya. Sayap-sayap dakwah yang dimiliki PKS merupakan sarana untuk mencari simpatisan yaitu tahapan seseorang sebelum menjadi anggota pendukung, simpatisan disini adalah seseorang yang mau diajak kearah kebaikan untuk mendalami ilmu agama.

Sarana atau media rekrutmen yang dimiliki PKS OKI untuk mengkaryakan Kadernya menjadi pembina maupun melakukan kegiatan keislaman dan juga sebagai sarana mencari simpatisan sebelum menjadi kader pendukung. Sarana yang dimiliki PKS OKI yaitu Sekolah Ialam Terpadu, Rohis SMP dan SMA , Lembaga Dakwah Kampus, Ikatan Remaja Masjid, Organisasi Pemuda, dan organisasi masyarakat di dewan pengurus cabang. Setiap orang yang tergabung dalam dalam beberapa saran tersebut tidak langsung menjadi anggota dari sayap dakwah akan menjadi kader PKS namun sesuai dengan pemahan dan kesadaran yang di miliki individu setiap orang tidak digiring untuk berpartai dan menjadi anggota PKS karena memang tujuan utama dari media-media rekrutmen PKS ini adalah untuk mengenalkan dan mengajak untuk mendalami agama islam.

Pada proses penjaringan kader yang menjadi anggota pemula yaitu yang tergabung dalam media-media rekrutmen PKS tidak langsung dikenalkan dengan Partai Keadlan Sejahterah. Namun hanya dikenalkan akan islam dan syariatnya setelah kader pemula mengikuti pembinaan di media-media rekrutmen barulah mereka diasah pemahamannya tentang pentingnya berpolitik dengan bergabung dipartai,i memahamkan akan tujuan partai PKS dan tujuan sebagai umat islam. Jika muncul kesadaran dalam diri individu untuk tergabung dalam Partai PKS mereka diikutkan dalam kegiatan PKS. Inilah yang disebutkan dalam proses penjaringan yaitu pengurus, agensi atau kader partai untuk menawarkan partai kepada masyarakat umum yang telah memenuhi syarat atau yang ingin direkrut. Setelah kader pemula dibina memenuhi persyaratan menjadi pribadi muslim sejati barulah seseorang tersebut dikenalkan dengan PKS. Namun tidak adanya pemaksaan dalam hal tersebut. Persyaratan kader yang ingin drekrut inilah menjadi landasan untuk mewujudkan tujuan dari partai PKS sendiri dimana setiap kadernya harus terlebih dahulu menjadi pribadi muslim yang baik dan taat. Proses rekrutmen

awal inilah juga menjadi hal yang penting karena dari merekalah calon-calon pejabat politik akan dipilih.

Setiap orang yang menjadi anggota pemula yang tergabung media rekrutmen politik PKS belum diminta berkontribusi kepartai karena mereka difokukan untuk memperbaiki diri pribadi terlebih dahulu dengan memperbaiki aqidah, memperbaiki akhlak dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Kader pemula yang aktif di media rekrutmen PKS dan aktif mengikuti pembinaan awal akan tumbuh kesadaran dari individu tersebut, tidak semua yang tergabung dalam sekolah Islam Terpadu, ikatan remaja masjid, organisasi masyarakat dan rohis maupun lembaga dakwah kampus itu harus menjadi kader PKS, keputusan untuk menjadi kader PKS dikembalikan lagi ke Individunya karena memang dalam pembinaan awal kader pemula sama sekali tidak dilibatkan dalam kegiatan partai.

Pada proses awal kader pemula diajarkan untuk melakukan kebaikan, belajar ilmu tauhid, memperbaiki aqidah dan akhlak. Capaian sebagai kader pemula yaitu terbentuknya pribadi slami, yaitu seseorang yang memiliki sifat terpuji, tidak melaukan kesyirikan, ketauhidan terhadap tuhan. Menjadi

seorang muslim sejati. Seseorang mendapat capaian tersebut dengan aktif mengikuti pembinaan awal atau mentoring yang dibina oleh seorang murobbi. Inilah bentuk penyaringan proses rekrutmen untuk menjadi anggota biasanya PKS.

PKS memiliki tahapan rekrutmen yang sistematis pada setiap jenjang kadernya, dilakukan rekrutmen dengan berbagai kriteria yang harus dicapai kader pada setaip jenjang. Pada tahap penyaringan kader akan dibentuk memiliki kekokohan iman, ilmu dan amal tahap selanjutnya mampu beramal jamai, lalu memiliki keahlian, kepedulian dan menjadi tokoh masyarakat barulah dibentuk untuk memiliki wawasan global dan menjadi pelopor perubahan dan negarawan. Kesadaran Akan pentingnya partai politik sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama yaitu mensajerahkan seluruh masyarakat telah terbentuk sedari awal oleh kader yang memutuskan untuk tergabung menjadi anggota pendukung PKS.

Rekrutmen Calon Legislatif

Perempuan

Kesadaran perempuan untuk terjun keranah publik terutama publik masih sangat rendah terbukti dengan rendahnya presentasi perempuan di

lembaga legislatif walaupun kuota perempuan telah ditetapkan 30 persen, namun yang lulus keparlemen jauh dari kuota 30 persen. Dapat dilihat dari persentase perempuan yang menjadi anggota Legislatif di Kabupaten OKI pada pemilu 2009 persentase perempuan hanya 6,66 persen dan pada tahun 2014 dan 2019 persentase perempuan hanya 11,11 persen. Banyak faktor yang melatar belakangnya salah satunya adanya *stereotipe* yang melekat pada perempuan bahwa ranah kerja perempuan hanya di ranah domestik saja tidak pada ranah publik, sehingga perempuan *tersubordinasi* karena budaya masyarakat Indonesia yang menganut sistem patriarki. Perempuan dianggap tidak layak di dunia politik karena perempuan itu lembut, menggunakan perasaan dan lemah sedangkan politik itu kotor keras dan kasar yang hanya cocok untuk laki-laki. Paradigma inilah yang membuat perempuan diposisikan pada *second sex*, berada di bawah laki-laki. Adanya paradigma inilah yang melekat pada masyarakat yang membuat kesadaran akan berpolitik perempuan masih rendah.

Perempuan dianggap tabu untuk masuk ke dunia politik banyak beranggapan bahwa perempuan berada

di bawah laki-laki, *stereotipe* bahwa perempuan hanya bekerja di dapur, sumur dan kasur juga tidak terpisahkan dari budaya masyarakat Indonesia yang patriarki. Tentu saja ini yang menjadi kendala terbesar yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia yang perlu diperjuangkan akan nasib dan haknya di parlemen sehingga kebijakan yang dibuat lebih sensitif gender. Oleh karena itu partai harus penting dalam memperhatikan siapa yang akan diusung untuk menjadi Calon anggota legislatif sehingga secara kualitas dan juga modal yang dimiliki caleg tersebut dapat mengantarkannya lolos keparlemen. Tidak hanya *stereotipe* dimasyarakat yang membuat perempuan susah lolos ke parlemen namun juga fenomena masyarakat yang pragmatis sekarang ini juga membuat kiprah caleg perempuan di dunia politik semakin tersendat, partai tidak hanya harus membekali para kadernya dengan pengalaman dan pendidikan politik tetap partai juga harus dapat merekrut kader yang dijadikan calon legislatif memiliki berbagai modal untuk memenangkan pemilu.

Rekrutmen politik merupakan seleksi kandidat yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif. Seleksi kandidat adalah tahapan penting untuk

menghasilkan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat. Hasil yang diperoleh tergantung bagaimana proses rekrutmen dilakukan. Di dalam *rekrutmen* politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik yang perlu diketahui secara luas. Kajian-kajiannya yaitu berdasarkan kemampuan, kaderisasi dan pramodial.

Jalur *rekrutmen* berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Semua faktor-faktor tersebut perlu dikaji dan fahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Selain itu, seorang pemimpin harus mempunyai skill, kecakapan, keahlian untuk terjun kedalam dunia politik. Karena dunia politik merupakan dunia yang keras penuh persaingan taktik dan teknik. Bukan sembarang orang mampu direkrut untuk masuk kedalam dunia politik. Orang-orang tersebut terpilih karena memang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mampu menguntungkan negara maupun

memberi keuntungan partai-partai tertentu.

Partai Keadilan Sejahtera dalam proses rekrutmennya menganut sistem terbuka siapapun dapat mengajukan dan diajukan untuk menjadi anggota legislatif. Caleg boleh berasal dari eksternal namun harus memiliki tingkat elektabilitas di masyarakat, adanya keterjaminan terpilihnya calon perempuan tersebut dalam pemilu. Dalam kerangka politik lokal, proses seleksi kandidat terletak pada rekam jejak seorang figur dan popularitas yang menentukan dapat diterimanya seseorang oleh masyarakat. Seorang calon tersebut setidaknya harus memiliki modal sosial, modal politik dan modal ekonomi.

Kader Internal yang dipilih juga berdasarkan berbagai faktor, tentunya dalam mengajukan calon perempuan banyak kendala yang dihadapi oleh PKS dalam menentukan kader yang diajukan, baik masalah internal maupun eksternal. Pada pemilu 2019 kader perempuan yang dicalonkan oleh PKS kebanyakan adalah kader muda tentunya ada kelebihan dan kekurangannya, dari segi kelebihan kader-kader muda ini lebih mudah untuk menarik generasi milenial dan juga adanya warna dalam pemilu dengan hadirnya generasi milenial yang

mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di lihat dari kreatifitas dalam mensosialisasikan baik di zaman era digital seperti sekarang ini namun kelemahannya kurangnya pengalaman caleg muda yang belum tertokoh atau memiliki pengaruh di masyarakat.PKS membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada setiap kader yang ingin menjadi anggota legislatif. . Oleh karena itu dipilahlah kader-kader yang memang memiliki kemampuan yang memiliki massa agar dipilih oleh masyarakat

PKS membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi setiap kader untuk menjadi caleg. tentunya dalam penetapan kader untuk menjadi caleg ada sistem untuk menjaring setiap kader. Struktur PKS aan bermusyawarah untuk menentukan siapa tokoh perempuan yang akan dimajukan dengan berbagai kriteria seperti basis masa background pendidikan dan keluarga dan tentu saja berkomunikasi dengan para murobbi untuk melihat potensi yang ada pada diri setiap kader.

Jalur *rekrutmen* berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalammendapatkan jabatan-jabatan

politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa/memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.Hal ini menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya suatu partai politik yang perlu diketahui.Seperti yang terangkum didalam teori Almond dan G.Bigham Powell menjelaskan "*rekrutmen* politik tergantung pula terhadap proses penseleksian didalam partai politik itu sendiri".Jadi kesimpulannya setiap individu harus mempunyai skill yang mampu diperjual-belikan sehingga mampu menempati jabatan-jabatan penting suatu negara.

Kader yang dicalonkan sebagai anggota legislatif setidaknya sudah berada pada jenjang kader muda, paham akan pentingnya perempuan dalam berpolitik. Selain itu juga kader yang berada pada jenjang anggota muda kotmitmen dan juga rasa tanggung jawab terhadap partai juga besar. Sehingga jika mendapatkan dipilih untuk menjadi calon legislatif akan patuh atas keputusan partai. Karena mereka sudah paham bahwa Jabatan adalah amanah dari Allah yang harus dituntaskan dan juga dipertanggung jawabkan nantinya di hadapan Allah inilah keyakinan dari setiap kader PKS tentunya untuk kepentingan dakwah

yang harus mereka lakukan oleh karena itu alasan perempuan kader PKS mau bertarung di dalam pemilu dengan menyumbangkan materi, tenaga dan waktunya itu karena untuk dakwah.

Calon legislatif perempuan yang diusung menjadi caleg perempuan pada awalnya bukan mereka yang menawarkan diri atau mengajukan diri untuk dicalonkan tetapi dari partailah yang menyeleksi siapa saja yang dianggap cocok untuk dijadikan calon legislatif dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan, dan dalam menentukan nama calon legislatif dilakukan musyawarah oleh struktur pimpinan anggota Partai. Kebanyakan perempuan akan menolak untuk berpolitik karena memang perempuan merasa dirinya tidak cocok untuk terjun ke politik inilah yang membuat PKS kesusahan mencari kader yang memang mumpuni untuk bertarung di pemilu sehingga dicarilah kader yang memang mau bertanggung jawab atas dipilihnya dirinya sebagai calon legislatif.

Peran perempuan di dunia publik terutama politik sangat kurang oleh karena itu partai politik memang dituntut aktif untuk menghasilkan kader perempuan yang berkualitas untuk dijadikan sebagai calon legislatif. Tentunya dalam pengkaderannya

perempuan tidak dikesampingkan dilihat dari semangat dan alasan kader-kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera yang berani maju ke dunia politik. Disini dapat dilihat bagaimana kontribusi kader terhadap dakwah inilah bukti nyatanya dengan taat terhadap keputusan pemimpin.

Kader perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera dari tahun 2004 selalu ada yang lolos ke parlemen hanya pada pemilihan tahun 2014 yang tidak memiliki wakilnya di parlemen tentu ini menjadi penyemangat untuk perempuan kader-kader PKS untuk bergerak menyuarakan suaranya dengan ikut berkontribusi sebagai calon legislatif perempuan. Dari data yang didapat bahwa kebanyakan calon legislatif perempuan yang dimajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah generasi muda yang berumur antara 24-28 tahun alasan utamanya selain mengajak para generasi milenial lebih melek terhadap politik tentunya untuk memajukan pemuda-pemudi yang merupakan *agent of change* dan sebagai regenerasi kedepannya, semangat pemuda juga diharapkan lebih mewarnai pesta demokrasi politik pada tahun 2019 dengan kreatifitas dan semangat perubahan.

B. Proses Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera

Kaderisasi sangat penting mengingat perlu ada transfer pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam suatu kajian tertentu. Fungsi kaderisasi dalam partai politik adalah mempersiapkan calon-calon untuk siap menerima mengelola partainya kedepan. Kaderisasi juga merupakan proses untuk melatih dan mempersiapkan anggota partai dengan berbagai keterampilan, disiplin ilmu dan pengalaman untuk mencapai tujuan partai.

1. Penyiapan Kemampuan dan Kapasitas

Proses kaderisasi di PKS sudah tersusun secara sistematis dalam proses pengkaderannya banyak perangkat atau media yang digunakan untuk menambah kemampuan dan kapasitas setiap kader, sesuai dengan pedoman perangkat tarbiyah yang digunakan dalam pengkaderan yaitu seperti halaqoh, penugasan, mabit, jalsah ruhiyah, dauorah rihlah dan mabit.

Perangkat tarbiyah yang digunakan dalam pengkaderan yaitu Halaqoh adalah pengajian mingguan yang dilakukan secara berkelompok dalam rangka untuk meningkatkan ilmu

politik maupun pemahaman agama. Tujuan dari *halaqoh* sendiri yaitu membentuk kepribadian islami dan juga sebagai sarana untuk pendidikan politik. Aspek kepribadian yang juga dibentuk adalah aqidah, ibadah, moral dan wawasan pengetahuan.

Penugasan adalah upaya pelaksanaan dalam pencapaian tujuan *tarbiyah* dengan melibatkan atau memerintah peserta *tarbiyah* untuk melaksanakan, mengikuti suatu sarana di luar sarana *tarbiyah*. Penugasan adalah cara pengajaran dengan memberikan tugas dalam bentuk tugas baca, menghadiri acara tertentu, atau tugas-tugas lainnya yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada murobbi atau guru mengaji yang memberikan tugas tersebut. Tujuannya agar pemahaman peserta lebih mantap, pengalamannya lebih terintegrasi dan terdorong untuk berusaha lebih giat lagi.

Katibah sama dengan mabit kepenajangannya malam bina iman dan taqwah, yang merupakan salah satu sarana *tarbiyah ruhiyah* dalam bentuk menginap bersama dengan menghidupkan malam untuk memperkuat hubungan dengan Allah serta meningkatkan kecintaan kepada rasulullah SAW, meningkatkan *Akhlak rabbani*, memperkuat *ukhwah* dan menambah bekal dakwah.

Dauroh dilakukan berkala pada setiap waktu tertentu. Tujuan dauroh yaitu, menyiapkan individu muslim yang berkomitmen, menyiapkan pemimpin, menyiapkan kajian riset ilmiah dalam berbagai bidang aktivitas islami, membangun kesadaran dan wawasan pengetahuan bagi pesonil maupun pemimpin, membangun kesadaran untuk menganalisa berbagai bidang persoalan, membangun kesadaran jurnalistik bagi personal maupun pemimpin, membangun kesadaran dan wawasan ketarbiyahan, membangun kesadaran dan wawasan yang jernih diberbagai bidang tingkat sosial, membangun kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai arus nilai yang mendukung islam, musuh islam dan dunia islam kontemporer.

Rihlah memiliki tujuan yaitu tujuan individual dan tujuan umum. Tujuan-tujuan individual rihlah yaitu Olahraga dengan manfaat sebagai penguatan badan, dan juga sebagai penghilang kejenuhan dengan rutinitas kerja. Ikut serta melakukan refreshing mental dan fisik untuk memperbarui semangat, serta membiasakan amal jama'i secara teratur. Berlatih menanggung beban fisik, menahan lapar dan dahaga, serta bersabar terhadap terhadap hasrat psikis dan fisik untuk

istirahat dan bersantai, makan dan minum. Membiasakan diri bergabung dan bekerjasama dengan orang lain dalam rangka memompa semangat dan melatih diri mengemban tanggung jawab.

2. Kaderisasi Berjenjang

Model kaderisasi yang dilakukan PKS yaitu dengan cara model kaderisasi berdasarkan kombinasi dari dua model bertahap dan keahlian, model ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan fungsi-fungsi partai yang akan dijalankan dalam struktur organisasi partai. perjenjangan kaderisasi berdasarkan pelapisan yang bertahap. Model kaderisasi secara berjenjang yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera yaitu dengan berdasarkan peraturan yang ada dalam AD atau ART PKS. Tahapan itu terdiri dari anggota pemula, anggota muda, anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli dan anggota purna. Masing-masing jenjang melakukan tahapan materi kaderisasi sebagai jenjang kader. Sedangkan pada model keahlian didasarkan pada fungsi pengelolaan partai yang membutuhkan keahlian khusus sehingga materi kaderisasi lebih menonjolkan sisi keahlian tertentu yang harus dimiliki kader partai.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa PKS menggunakan sistem kaderisasi yang bertahap dan berjenjang. Setiap kader harus melalui semua tahapan satu-persatu, seseorang tidak dapat langsung menjadi seorang kader tapi memerlukan proses, dalam setiap jenjang juga memiliki kriteria masing-masing yang juga ada proses seleksi. Jika seseorang telah memenuhi capaian dalam sebuah jenjang didapat menaiki kejenjang berikutnya yang tentunya ada proses pengujian. Untuk menaiki tingkat kejenjang berikutnya bukan berdasarkan lama waktunya tetapi, berdasarkan pemahaman, implementasi dan capai-capaian yang didapat. Jika seseorang hanya mengikuti saja proses pembinaan tapi tidak menambah pemahaman maka bisa jadi dia hanya terus berada pada jenjang pemula saja.

Adanya pemahaman yang diterima oleh kader dan juga kesadaran. Setiap jenjang memiliki capaian yang berbeda dan juga memiliki materi yang berbeda adapun pelatihan yang didapat kader, setiap memiliki materi yang berbeda-beda diawal akan dikenalkan akan ketauhidan melalui berbagai kegiatan atau disebut dengan sarana seperti *halaqoh*, *dauroh*, *ta'lim* dan sebagainya untuk menempah

pemahaman kader. Aturan kaderisasi inilah di sebut *manhaj* kaderisasi yang terdapat sistem dan pola pengkaderan yang sifatnya rahasia, materi atau capaian yang harus ditempuh hanya boleh diketahui sesuai dengan dimana kader itu berada, jika kader muda maka dia tidak dapat mengakses atau mengetahui kader madya begitupun seterusnya.

3. Pendidikan Politik Caleg Perempuan

Calon Legislatif perempuan harus menyiapkan diri baik dari segi mental maupun material, mental diperlukan karena hampir semua kader yang dimajukan sebagai caleg dari generasi muda yang baru saja lulus dari universitas dengan lingkungan yang ideal, namun terbanding terbalik dengan realitas yang ada di masyarakat sesungguhnya. Banyak tantangan maupun yang dihadapi kader dalam masa kampanye, namun cara inilah yang dilakukan oleh DPD PKS untuk memberikan pendidikan politik secara langsung kepada caleg maupun kader-kader yang ikut dalam kampanye. Sehingga mengetahui realitas politik di masyarakat sesungguhnya.

Banyaknya calon legislatif perempuan yang muda diharapkan menjadi gerbang untuk penokohan

perempuan di OKI dan juga untuk memberikan pendidikan politik sedini mungkin untuk keberlangsungan regenerasi politik dalam partai politik. Terutama bagi PKS muda yang mengambil peran penting dalam kampanye di tahun 2019 ini. Karena memang target caleg muda adalah untuk merebut simpatik generasi milenial.

Calon legislatif juga harus memperkaya pengetahuan dengan berbagai cara, jika dilihat memang kader muda masih belum banyak pengalaman dan pengetahuan namun semangat pemuda inilah yang menjadi *ghiroh* bagi seluruh kader. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh DPD PKS OKI untuk meningkatkan kualitas caleg perempuan selain beberapa pelatihan yang difasilitasi oleh DPD.

Beberapa agenda untuk meningkatkan kemampuan kader maupun caleg perempuan yang dilakukan oleh DPD PKS OKI seperti *work shop* strategi dalam kampanye, pelatihan yang mengundang anggota dewan dari tingkat provinsi maupun pusat, selama masa kampanye DPD PKS OKI membuat agenda *sharing-sharing* bersama kader perempuan PKS yang menjambat sebagai anggota dewan, selain pelatihan yang disiapkan oleh partai, kader juga harus memiliki

kesadaran sendiri untuk memperbanyak ilmu dengan *sharing* secara pribadi dengan mantan-mantan caleg maupun kader yang pernah menjabat sebagai anggota dewan.

Pemilu 2019 diharapkan menjadi tempat menempah diri generasi muda, sehingga dapat menyiapkan diri pada pemilu berikutnya dengan mengetahui kondisi lapangan. Tentunya pembelajaran yang didapat di lapangan tidak hanya bagi kader yang diajukan pada tahun ini saja, namun secara tidak langsung ini juga sebagai pembelajaran bagi semua kader yang kemungkinan besar akan di calonkan di periode berikutnya. Semua kader secara tidak langsung belajar karena memang beban dalam proses kampanye dan sosialisasi tidak hanya ditanggung bagi kader sebagai caleg tetapi juga bagi semua kader, karena itu setiap kader juga membantu semua caleg untuk melakukan sosialisasi ini bentuk pembelajaran yang efektif sehingga semua kader dapat dengan *learning by doing*, sehingga timbulnya kesiapan. Oleh karena itu, PKS menyiapkan berbagai strategi seperti melakukan pelatihan dengan mengundang pembicara yang menguasai ahli strategi. seperti Kegiatan *workshop* yang diikuti oleh seluruh caleg sesumsel

kegiatan ini dilakukan di awal masa kampanye sebagai bekal dalam masa kampanye, ada berbagai strategi dan juga motivasi yang diberikan. Setelah itu hasil *workshop* di diskusikan lagi ditataran caleg daerah agar strategi yang dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat di setiap daerah.

Pelatihan perempuan dengan tema peran perempuan dilegislatif, yang dijadikan sebagai pembicara adalah kader PKS yang pernah menjabat sebagai calon legislatif, dalam forum ini diluruskan akan niat caleg, memotivasi caleg maupun kader yang lain, menceritakan bagaimana dapat lolos ke legislatif, dan strategi yang digunakan. Disini juga kader dibuat berkelompok untuk setiap Dapil yang ada diskusi dan tanya jawab antar caleg dan pembicara, dengan kegiatan ini diharapkan sebagai gerbang komunikasi untuk pembelajaran.

Flash mob adalah kegiatan *long march* maupun konvoi motor dengan menggunakan atribut PKS dan membagikan alat peraga kampanye seperti stiker ke masyarakat kegiatan ini dilakukan dua minggu sekali atau tiga minggu sekali dilakukan tiga bulan mendekati pemilu. Kegiatan ini memeriahkan dan mewarnai kampanye pada tahun ini sebab hanya PKS yang mengadakannya. Sehingga PKS

mendapatkan rekor untuk melakukan *flash mob* terbanyak di seluruh Indonesia. Ini bentuk kesuksesan pengkaderan PKS yang memiliki banyak kader yang loyal.

Derich selling adalah kegiatan sosialisasi sekaligus pencerdasan kepada masyarakat dengan langsung kerumah-rumah warga, kader berangkat dengan menggunakan beberapa bahkan lebih mobil untuk membawa kader-kader PKS ke sebuah daerah yang setiap minggunya bergantian untuk setiap Dapil. Disinilah peran kader sangat membantu untuk memperkenalkan PKS sendiri maupun caleg-caleg dari tingkat pusat, provinsi dan daerah tak ketinggalan presiden yang diusung juga disosialisasikan. Program selanjutnya yaitu Pak otang adalah gerakan untuk mengajak tetangga di depan belakang samping kiri kanan rumah pada setiap kader, dan juga gerakan 112 yaitu setiap seorang kader mengajak atau membina dua belas orang. Inilah beberapa kegiatan dan program selama kampanye yang dilakukan oleh PKS OKI pada pemilu 2019. Seperti yang diungkap oleh MN bahwa:

C. KESIMPULAN

Proses rekrutmen anggota yang dilakukan PKS yaitu pertama melakukan penjangkaran beberapa sarana

penjaringan kader pemula dilakukan PKS melalui Rohis, Ikatan Remaja Masjid, Lembaga Dakwah Kampus, Organisasi Kepemudaan Dan Masyarakat di Dewan Pengurus Cabang. Kedua melakukan penyaringan, kader pemula diseleksi sesuai dengan syarat yang ditentukan. Ketiga, Penetapan sebagai sebagai kader. PKS juga melakukan rekrutmen calon legislatif perempuan dengan beberapa jalur yaitu Berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki kader internal maupun eksternal seperti modal sosial, politik dan Ekonomi. Berdasarkan kaderisasi, kader yang berada pada jenjang kader muda yang dapat menjadi caleg dan berdasarkan primodial.

Kaderisasi dilakukan PKS berkaitan dengan penyiapan kapasitas dan kemampuan seperti halaqoh, penugasan, *jalasah ruhiyah, dauorah, rihlah* dan mabit. Melakukan pengkaderan dan pengkaryaan berdasarkan jenjang dan keahlian dan melakukan pendidikan politik calon legislatif perempuan saat proses kampanye

DAFTAR PUSTAKA

Azlansyah, 2011. Pola Rekrutmen Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Pekanbaru baru periode 2010-2015 .<https://repository.unri.ac.id/xmlui/>

bitstream/handle/123456789/1411/azlansyah.pdf?sequence=1.
Diakses pada 15 Januari 2019.

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.

Bungin, Burhan. 2012. Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Haris, dkk, 2016, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia, Jakarta: LIPI.

Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya. Bandung: Widya Padjadjaran.

Harda, Nanda (2016). Pendidikan Politik Dalam Kuasa Simbolik kajian Mengenai Dinamika Politik Anak Mudayang Tergabung Dalam Partai Politik Di Kota Malang. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmd3ee8c898cfull.pdf>. Diakses pada 14 Januari 2019.

Manik Nurhidayah.Br, Dkk, (2015). Pengaruh Fungsi Parpol Dalam Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2014. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/13087/11852>. Diakses pada 14 Januari 2019.

Nimrah, Dkk, (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014), <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/229>, Diakses 15 Januari 2019.

Rahmadania, Fitri, (2015), Rekrutmen Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi

Kasus Mengenai Rekrutmen Politik
PPP di Dapil I dan V di Kabupaten
Sampang, Jawa
Timur).<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmd3ee8c898cfull.pdf>. Di akses 15
Januari 2019

Rasyidin dan Aruni, Fidhia. 2016. Gender
Dan Politik, Keterwailan Wanita
Dalam Politik. Sulawesi: Unimal
Press.

Toni, (2013), Model Kaderisasi Partai Politik
Pada Dpw Partai Keadilan Sejahtera
(Pks) Provinsi Lampung,
<http://digilib.unila.ac.id/11097/9/cover%2C%20Daftar%20Isi%20%26%20Pustaka.pdf>. di akses 13 januari
2019

Yanika, Allan, 2014, Rekrutmen Calon
Anggota Legislatif Partai Amanat
Nasional Provinsi Riau Periode
2014-2019, <https://media.neliti.com/media/publications/31866-ID-rekrutmen-calon-anggota-legislatif-partai-amanat-nasional-provinsi-riau-periode.pdf>. Di akses 15 Januari
2019.